

KOPERASI DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Sri Lestari Harsosumarto*

Abstrak

Disamping faktor pendidikan, munculnya persoalan perempuan tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor ideologi, struktural dan kultural, ketiganya saling terkait menguatkan suatu situasi yang sangat tidak menguntungkan perempuan. Ideologi patriaki yang bergandengan dengan ideologi gender telah merasuki struktur dan sistem sosio kultural masyarakat yang menempatkan perempuan di posisi pinggiran. Internalisasi nilai-nilai patriaki yang mengunggulkan peran dan status laki-laki telah mendukung terciptanya peran dan status perempuan yang bersifat sekunder. Kondisi semacam ini pada dasarnya merupakan pencerminan dari diskriminasi sosial, politik, ekonomi, adat, budaya, hukum, dan agama terhadap perempuan,

Dengan berkiprah di koperasi perempuan tidak banyak terhambat oleh ideologi patriaki yang mengunggulkan pria dari pada perempuan, karena dalam koperasi pria dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban sama, dalam koperasi tidak ada diskriminasi sosial, politik, ekonomi, adat, budaya, hukum dan agama. Dalam koperasi perempuan disamping dapat memperjuangkan kepentingannya, juga dapat mengaktualisasikan jati dirinya, bebas menyampaikan aspirasi dan pendapatnya,

Dengan kata lain koperasi dapat berperan strategis memberdayakan perempuan, dan sebaliknya dengan koperasi perempuan dapat membuktikan kompetensi dan kelebihanannya, sebagaimana ditunjukkan oleh keberhasilan beberapa Koperasi dan UMKM yang dikelola perempuan tanpa harus mengorbankan perannya sebagai ibu rumah tangga.

Kata kunci : Koperasi berperan strategis memberdayakan perempuan, dan sebaliknya dengan koperasi perempuan dapat membuktikan kompetensi dan kelebihanannya, ditunjukkan dengan keberhasilannya sebagai pelaku UMKM

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PEREMPUAN INDONESIA

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2000 penduduk Indonesia berjumlah 209 juta merupakan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia. Dari jumlah tersebut 105 juta (50,24%) adalah wanita dan 104 juta (49,76%) pria. Separuh jumlah penduduk tersebut tinggal di kota, persentase penduduk wanita dan pria di kota dan di desa tidak jauh berbeda, yaitu di kota : 50,1% wanita dan 49,9% pria, sedang di desa: 49,7% wanita dan 50,3% pria.

Dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Indonesia yang berusia 10 tahun keatas, pendidikan yang ditamatkan wanita masih lebih rendah dari pria di semua jenjang pendidikan terlebih lagi pada tingkat perguruan tinggi. Di kota: 27% wanita tidak tamat SD, 28% tamat SD, 18% tamat SLTP, 22% tamat

*) Kasubid Evaluasi dan Pelaporan serta Peneliti Muda Bidang Perkoperasian, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK

SMU/SMK, dan hanya 5% tamat perguruan Tinggi, sedang pria pendidikan tertingginya 19% tidak tamat SD, 26% tamat SD, 20% tamat SLTP, 28% tamat SMU/SMK, dan 7% tamat perguruan tinggi. Di desa : 48% wanita tidak tamat SD, 34% tamat SD, 11% tamat SLTP, 6% tamat SMU/SMK, dan hanya 1% tamat perguruan Tinggi, sedang pria pendidikan tertingginya 38% tidak tamat SD, 36% tamat SD, 14% tamat SLTP, 10% tamat SMU/SMK, dan 1% tamat perguruan tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan di Indonesia (kota dan desa) tingkat partisipasi perempuan semakin rendah. Tingkat pendidikan akan berkorelasi dan berbanding lurus dengan kondisi tingkat perekonomian dan kesejahteraannya karena dengan tingkat pendidikan rendah kesempatan memperoleh pekerjaan, menduduki jabatan-jabatan strategis baik di perusahaan, pemerintahan, maupun parlemen juga rendah. Di dunia pendidikan saja sebagai contoh tingkat partisipasi perempuan sebagai tenaga pengajar juga semakin menurun dengan semakin tingginya jenjang pendidikan, yaitu partisipasi guru wanita di SD 54% , SLTP 44%, SLTA 38%, dan perguruan tinggi hanya 29%.

Wanita yang bekerja umumnya hanya membantu usaha rumah tangga sedangkan pria yang bekerja pada umumnya berwiraswasta baik dengan bantuan buruh/pegawai maupun tidak, adapun data wanita bekerja yaitu 33% wiraswasta, 31% menjadi buruh/pegawai, 36% membantu usaha rumah tangga, sedang data pria bekerja: 53% wiraswasta, 37% menjadi buruh/pegawai, dan 10% membantu usaha rumah tangga. 36% wanita bekerja berstatus membantu usaha rumah tangga, disini wanita merupakan tenaga kerja keluarga tidak dibayar (*unpaid family workers*), fenomena ini menunjukkan meskipun wanita aktif dalam kegiatan produktif dianggap tidak bekerja, demikian halnya dalam pekerjaan tertentu seperti kerja paruh waktu, sub kontrak, atau *putting out worker* tidak dianggap bekerja sehingga data statistik menunjukkan tingkat pengangguran wanita usia 15 tahun keatas lebih tinggi dari pria yaitu wanita 4,4% sedang pria 4%.

Disamping faktor pendidikan sebagaimana disebutkan diatas, munculnya persoalan perempuan juga tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor ideologi, struktural dan kultural, ketiganya saling terkait menguatkan suatu situasi yang sangat tidak menguntungkan perempuan. Ideologi patriaki yang bergandengan dengan ideologi *gender* telah merasuki struktur dan sistem sosio kultural masyarakat yang menempatkan perempuan di posisi pinggiran. Internalisasi nilai-nilai patriaki yang mengunggulkan peran dan status laki-laki telah mendukung terciptanya peran dan status perempuan yang bersifat sekunder. Kondisi semacam ini pada dasarnya merupakan pencerminan dari deskriminasi sosial, politik, ekonomi, adat, budaya, hukum, dan agama terhadap perempuan.

II. KESADARAN PEREMPUAN UNTUK BERPERAN SERTA DALAM PEREKONOMIAN

Secara umum masih sedikit diantara kita yang menyadari bahwa perempuan menghadapi persoalan yang *spesifik gender*, yaitu persoalan yang hanya muncul karena seseorang atau kelompok orang adalah perempuan. Tidak saja di kalangan laki-laki, tapi kaum perempuan sendiri yang masih banyak tidak menyadari hal

tersebut, sehingga memandang tidak perlu persoalan perempuan harus dibahas dan diperhatikan secara khusus. Hal ini terjadi karena mendalamnya penanaman nilai-nilai mengenai peran laki-laki dan perempuan, yang menganggap sudah kodratnya perempuan sebagai *ratu rumah tangga*, sebagai pengendali urusan domestik saja begitu dominan di masyarakat kita, sehingga adanya pikiran dan keinginan mengenai kesempatan beraktivitas di luar domain rumah tangga dianggap sesuatu yang mengada-ada, sehingga tidak aneh muncul paradigma perempuan tidak perlu sekolah tinggi toh akhirnya hanya akan mengurus sekitar kasur, sumur, dan dapur.

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan terbukanya arus globalisasi dan informasi, serta meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, meskipun tetap lebih rendah dari pada tingkat pendidikan laki-laki sebagai ditunjukkan data BPS tahun 2000, perempuan Indonesia sudah keluar dari tembok batas rumahnya untuk bekerja dan berkarya, baik sebagai pegawai pemerintah, karyawati, perusahaan baik nasional maupun multinasional, serta sebagai pengusaha, dengan tidak mengabaikan peran utamanya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Perempuan yang memutuskan untuk bekerja selain untuk mengoptimalkan pendidikan dan potensinya, juga adanya kesadaran untuk menopang kehidupan rumah tangganya, karena dengan semakin majunya peradapan dunia semakin tinggi pula kebutuhan hidup dan rumah tangganya, dan yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga mencurahkan waktu sepenuhnya untuk suami dan anak-anaknya adalah keputusan yang baik pula karena sebenarnya kewajiban mencari nafkah menurut agama khususnya Agama Islam adalah berada dipundak pria atau suami. Apalagi setelah perekonomian Indonesia dilanda krisis pada pertengahan tahun 1997, PHK dan pengangguran bertambah, karena krisis suami sebagai kepala rumah tangga menjadi pengangguran, kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, kesehatan tak mungkin dihentikan, memaksa para istri yang semula hanya sebagai ibu rumah tangga mulai berperan di berbagai bidang usaha sebagai pelakon usaha. Menurut hasil penelitian Badan Pengembangan Sumberdaya KPKM tahun 2001, melalui 32 orang responden menyatakan bahwa motivasi wanita melakukan usaha adalah untuk (1) mengurangi pengangguran atau menciptakan lapangan usaha (2) meringankan beban keluarga (3) mengubah nasib (4) menjadi diri sendiri (5) kaya dan (6) meningkatkan kesejahteraan .

Banyaknya motivasi wanita melakukan usaha karena ingin mengurangi pengangguran atau menciptakan lapangan usaha, menunjukkan adanya kesadaran dari wanita atas kondisi pengangguran yang semakin meningkat, adanya kesadaran dari wanita untuk menciptakan pekerjaan bukan mencari pekerjaan.

Dalam kenyataannya, meskipun banyak perempuan Indonesia telah banyak memperoleh gelar sarjana, master, bahkan doctor, hanya sedikit sekali pucuk pimpinan baik di pemerintahan maupun swasta yang diduduki oleh perempuan, tentu saja selain perusahaan-perusahaan yang memang dikelola oleh perempuan seperti perusahaan catering, kosmetik, majalah wanita, jasa psikologi, kesenian, atau kerajinan-kerajinan tertentu,

Dalam hal keterlibatan perempuan Indonesia dalam dunia usaha atau sebagai pengusaha/wirausaha telah ada sejak zaman ke zaman, sejak dulu wanita

telah terjun dalam dunia perdagangan, misalnya wanita-wanita di Solo telah membantu ekonomi keluarga bahkan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dari usaha batik yang mereka kelola. Demikian halnya di Palembang, Padang, Lampung, dan Ujung Pandang, wanita-wanita sukses mengelola industri rumah tangga berupa kain songket, di daerah-daerah lain terkenal dengan berbagai jenis kerajinan tangan ataupun makanan sebagai ciri khas suatu daerah adalah hasil karya tangan-tangan perempuan.

Wanita potensial untuk melakukan berbagai kegiatan produktif yang menghasilkan dan dapat membantu ekonomi keluarga, dan lebih luas lagi ekonomi nasional, apalagi potensi tersebut menyebar di berbagai bidang maupun sektor. Dengan potensi tersebut wanita potensial berperan aktif dalam proses *recovery* ekonomi yang masih diselimuti berbagai permasalahan, untuk itu potensi perempuan perlu ditingkatkan atau paling tidak dikurangi penyebab-penyebab mengapa perempuan sulit maju dalam karier bagi perempuan bekerja dan sulit maju usahanya bagi perempuan pelaku usaha.

Menurut Cakrawala Cinta (Ide Usaha Kecil dan Madya, 1994), terdapat perbedaan penting yang menentukan jiwa kewiraswastaan, antara pria dan wanita, yang mana kebanyakan wanita sulit untuk maju karena :1). **Wanita kurang diajar bersaing**, mereka tidak dikembangkan dengan semangat persaingan yang baik dalam dunia usaha. Sejak kehidupan kanak-kanak mereka kurang terlibat, kurang terlatih dalam *teamwork*, misalnya dalam *teamworksport*. Mereka kurang bertanding, malahan cenderung menghindari *konfrontasi*, karena *konfrontasi* bukan sifat lemah lembutnya wanita, 2). **Wanita terlalu melihat detail perkara-perkara kecil**, mereka terlalu terlalu berkepentingan atas hal-hal yang detail dari masalah, sehingga tidak terbiasa melihat kedudukan perspektif keseluruhannya, karena terbiasa dengan hal-hal kecil, melepaskan konteks global perusahaan, akan mengganggu pengembangan jiwa kepemimpinannya, 3). **Wanita emosional dalam situasi yang tidak tepat**, sehingga banyak wanita menghabiskan waktu memikirkan "apa kata orang nanti" ketika seharusnya dia berpikir secara profesional untuk menyelesaikan tugasnya, sering menanam "perasaan tidak enak" secara berkepanjangan, sering emosional dan sentimentil apabila dikritik tentang pekerjaannya, sikap maupun penampilannya, 4). **Wanita kurang berani mengambil resiko**, berkaitan dengan sering memikirkan "apa kata orang nanti", wanita cenderung melakukan tugas-tugas secara aman dan average (rata-rata kebiasaan, sehingga pimpinan menganggap mereka sebagai pegawai biasa-biasa saja yang rata-rata, tidak akan menuntut jenjang promosinya, 5). **Wanita kurang cukup agresif**, karena sifat agresif tidak searah dengan pendidikan yang diterimanya selama ini, bahwa wanita harus feminim, jangan agresif, sehingga tidak "berani " mengungkapkan perasaan dan idenya secara tegas (asertif), dan tidak "berani " mengatakan "tidak" atas pendapat dan sikap teman kerjanya yang diketahuinya salah, 6). **Mereka lebih senang bereaksi daripada mengambil inisiatif**, mereka terlalu riuh untuk menonjolkan kelebihan pendapat dan kepemimpinannya dan lebih suka jalur yang telah ada, 7). **Wanita lebih berorientasi pada tugas dari pada tujuan**, berpikir besar pada tujuan dan sasaran, terkalahkan oleh kebiasaannya dalam pekerjaan rutin dan yang detail.

III. PROGRAM PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN USAHA MIKRO KECIL

Menurut Mansour Fakih dalam *Gender Sebagai Alat Analisis Sosial* (1996), terdapat dua aliran dalam gerakan feminisme, yaitu antara pemikiran yang lebih memfokuskan *masalah perempuan* berhadapan dengan pemikiran yang memfokuskan sistim dan struktur masyarakat yang didasarkan pada *analisis gender*. Pemikiran yang memfokuskan pada *persoalan perempuan* sebagai sasaran analisis, pada dasarnya merupakan *aliran mainstream* dalam perbincangan nasib dan program kaum perempuan. Analisis ini mendasarkan pemikiran bahwa permasalahan perempuan berakar pada rendahnya kualitas sumberdaya perempuan itu sendiri, yang berakibat mereka tidak mampu bersaing dengan kaum laki-laki, termasuk dalam pembangunan. Oleh karena itu harus ada usaha untuk menghilangkan diskriminasi dalam pendidikan dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

Dalam analisis ini terdapat beberapa aliran antara lain yang mendasarkan pada paham modernisasi, yaitu melalui pendekatan pengentasan kemiskinan (*antipoverty*). Pada aliran ini dinyatakan bahwa perempuan miskin karena mereka tidak mempunyai akses terhadap sumberdaya alam maupun sumberdaya produktif, oleh karena itu perlu diciptakan proyek *peningkatan pendapatan* atau dilakukan pemberdayaan bagi kaum perempuan. Cara analisis yang lain dengan “pendekatan efisiensi”, yaitu pemikiran bahwa pembangunan mengalami kegagalan karena perempuan tidak dilibatkan, dengan demikian pelibatan itu sendiri lebih demi efisiensi pembangunan. Pendekatan efisiensi dan pengentasan kemiskinan (*antipoverty*) ini menjadi aliran *mainstream* mengenai usaha memecahkan masalah-masalah perempuan. Sebagian besar organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, USAID, ODA, pemerintah Dunia Ketiga, sebagian besar LSM di Indonesia menganut pemikiran tersebut. Aliran tersebut diaktualisasikan dengan program global yang dikenal dengan nama Perempuan Dalam Pembangunan (*Women In Development* atau *WID*), yang mendominasi wacana, pemikiran, maupun proyek-proyek yang terfokus pada perempuan.

Tidak ketinggalan Pemerintah Indonesia juga memulai program Perempuan Dalam Pembangunan dengan menetapkan peran yang “tepat” dan membentuk organisasi tempat wanita memainkan perannya. Dimulai dari GBHN 1973, peran perempuan dalam pembangunan diletakkan berkaitan dengan kehidupan keluarga: **“Pembinaan keluarga yang sejahtera adalah sarana pembinaan Generasi Muda.hak-hak wanita dijamin, serta kedudukannya dalam masyarakat dilindungi”**. Kemudian dalam GBHN 1978, yang memperluas peran dunia perempuan sampai ke **“segala bidang tetapi dengan peringatan bahwa peran perempuan dalam pembangunan tidak boleh mengurangi perannya dalam pembinaan keluarga sejahtera”**, Pada GBHN 1983 peran perempuan makin dikembangkan: **“... kegiatan wanita dalam pembinaan kesejahteraan keluarga antara lain melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),hak, kewajiban, dan kesempatan perempuan sama dengan pria dalam kegiatan**

pembangunan”. Peran tersebut diperluas dan ditingkatkan lagi dalam GBHN 1988 namun tetap dengan catatan mengikat posisi perempuan dalam keluarga. Sementara itu dalam GBHN 1993 disebutkan **”iklim sosial budaya perlu dikembangkan agar lebih mendukung upaya mempertinggi harkat dan martabat wanita hingga dapat berperan dalam masyarakat dan dalam keluarga secara selaras dan serasi”** Sedang dalam GBHN 1999 antara lain mengamanatkan: **”perlunya meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan baik di pusat maupun di daerah”**.

Dalam program-program tersebut, peran dan fungsi wanita didefinisikan dengan lima fungsi seperti yang tertuang dalam program PKK yaitu pendamping suami, pengelola rumah tangga, penerus keturunan, pendidik anak, dan warga negara, yang mempunyai tugas sebagaimana dirumuskan dalam 10 program pokok PKK, dalam hal ini wanita hanya dianggap sebagai pelengkap pelaku, dan tidak relevan. Demikian halnya mengenai sistem kepemimpinan yang bersifat fungsional, dimana wanita menjadi pimpinan karena suami adalah pimpinan dari suatu lembaga dan apabila sang suami diganti kedudukannya otomatis lepas juga jabatan istri. Dengan demikian status dan kedudukan wanita yang seharusnya *equal* atau sama dan sederajat dengan dengan pria tidak equal lagi, karena prospek kepemimpinan wanita seperti itu dapat dikatakan sangat tergantung pada kepemimpinan pria. Keadaan ini jelas melanggengkan ketergantungan dan keterpinggiran perempuan. Perempuan masih tidak dianggap, setiap usaha yang akan memberikan fasilitas kepada perempuan selalu ditolak karena adanya asumsi bahwa lelaki adalah kepala rumah tangga yang akan menanggung kehidupan perempuan.

Berkaitan dengan program pembangunan untuk perempuan, terdapat tiga program utama yang dilaksanakan secara sektoral oleh departemen dan lembaga, yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Urusan Wanita, yaitu: Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Program Bina Keluarga dan Balita (BKB), dan Program Peningkatan Pendapatan Bagi Perempuan melalui Industri Kecil. Program ini berpandangan bahwa masalah keterbelakangan perempuan karena perempuan itu sendiri, oleh karena itu program-program yang digulirkan difokuskan pada memenuhi kebutuhan praktis, bukan memenuhi kebutuhan strategis. Kebutuhan praktis biasanya berhubungan dengan kondisi kehidupan misalnya kurangnya sumberdaya, kebutuhan dasar seperti kesehatan, pangan dan air minum, dsbnya, yang mana perempuan hanya sebagai pemanfaat dan tidak merubah peran dan hubungan sosial budaya yang ada. Sedang kebutuhan strategis berkaitan dengan peranan, dan kedudukan dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti ekonomi, sistem politik, perundang-undangan, norma sosial budaya dan lain-lain, yang mana solusinya antara lain: a). melibatkan perempuan sebagai pelaku atau memfasilitasi perempuan untuk menjadi penentu dan pelaku kegiatan, b). dilakukan melalui penyadaran, meningkatkan kepercayaan diri, pendidikan dan pelatihan, pembentukan organisasi/lembaga, dsb.nya, c). memberdayakan perempuan agar dapat memperoleh kesempatan yang

lebih luas di segala bidang dan tingkat masyarakat, memperjuangkan akses perempuan terhadap sumberdaya yang lebih besar.

Sehubungan dengan pemberdayaan perempuan dan usaha mikro kecil, sebenarnya pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup serius, sebab usaha mikro kecil merupakan kegiatan ekonomi yang menjadi pilihan kebanyakan anggota masyarakat, terutama kelompok perempuan, yang banyak berkecimpung dalam kegiatan industri kerajinan dan industri rumah tangga, baik perempuan tersebut “bekerja sendiri” atau sebagai “pekerja keluarga yang tidak dibayar”. Perhatian tersebut antara lain dengan dikeluarkannya berbagai program, seperti kredit program, kredit untuk usaha kecil yang dikenal dengan KIK (Kredit Investasi Kecil) dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen). Adapun tujuan sosial politik dari KIK/KMKP ini adalah: a). Untuk membantu usaha kecil yang bergerak di semua sektor perekonomian termasuk pertanian, mendapatkan pinjaman jangka menengah untuk modal investasi dan modal kerja permanent, b). Untuk mempercepat pertumbuhan usaha kecil milik pribumi dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial yang semakin melebar. Pada Pakjan’90 yang isinya penyempurnaan sistim perkreditan, yang antara lain mewajibkan bank komersial menyalurkan 20% portofolio kreditnya untuk usaha kecil, disini KIK/KMKP diganti menjadi KUK (Kredit Usaha Kecil) dengan bunga mengikuti bunga pasar, Dalam pelaksanaannya menurut hasil penelitian Mari Elka Pangestu (1992): dari dana KUK yang tersedia realisasinya pada tahun 1994 (28,50%), tahun 1995 (35,3%), dan tahun 1996 sebesar 42,1%, yang mana lebih separoh dari dana KUK yang tersedia digunakan untuk sektor perhotelan, perdagangan, restoran, kredit konsumsi golongan menengah keatas, bukan untuk kegiatan produktif usaha kecil.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan PakMei’93 untuk memperbaiki kinerja program untuk usaha kecil, yang antara lain berisi: a). Penyediaan KLBI untuk kredit program swasembada pangan, pengembangan usaha kecil dan koperasi melalui skim KKUD, KKPA, dan KPRS/SS, b). Penyempurnaan beberapa skim kredit program dengan melakukan beberapa penyesuaian dalam mekanisme dan prosedur, disesuaikan dengan kondisi saat itu, dan untuk meningkatkan efektifitas kredit program KKUD dan KKPA digabung menjadi Kredit Kepada Koperasi (KKop) atau kredit untuk koperasi, c). Penambahan skim kredit untuk pembiayaan usaha kecil termasuk usaha mikro, dan meningkatkan Lembaga Keuangan Perdesaan termasuk BPR untuk pengembangan usaha kecil melalui bantuan likuiditas yang disebut skim Kredit Modal Kerja BPR (KMK-BPR) dan Kredit Pengusaha Kecil Mikro (KPKM).

Dengan demikian pemberdayaan usaha mikro kecil terdapat tiga jenis kredit yaitu kredit umum, kredit khusus (program) dan kredit penerusan. Selain itu BI juga memiliki program bantuan teknis untuk meningkatkan akses usaha kecil terhadap kredit perbankan, antara lain : Program Pengembangan Usaha Kecil (PPUK), Program Kemitraan Terpadu, dan Proyek Kredit Mikro. Kebijakan lainnya yaitu: penyisihan 5% dari laba BUMN untuk pengembangan usaha kecil, diutamakan usaha kecil yang memiliki potensi ekspor, pembentukan Pos Ekonomi Rakyat (PER), merupakan kelembagaan yang diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat informasi bagi UKM.

Seluruh kebijakan sebagaimana diuraikan diatas bersifat umum, artinya tidak membedakan laki-laki atau perempuan, keduanya memiliki peluang yang sama untuk mendapat kredit, dengan demikian kebijakan tersebut dapat dikatakan bersifat *gender blind*. Karena dalam akses terhadap sumber perkreditan, yang mensyaratkan collateral/agunan, perempuan akan mengalami hambatan, sebab status kepemilikan barang berharga atau harta yang dapat diajukan sebagai jaminan kebanyakan atas nama suami sebagai kepala rumah tangga. Sedang kredit yang dikhususkan untuk perempuan hanya Proyek Kredit Mikro dari BI dan kredit untuk kelompok sasaran wanita yang dikoordinir Menperta dalam kegiatan Peningkatan Peran Wanita (P2W), khususnya untuk kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUB).

IV. KOPERASI DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Koperasi merupakan wadah orang-orang atau badan hukum yang mempunyai kepentingan bersama dalam meningkatkan kesejahteraannya. Dengan demikian koperasi wanita merupakan wadah yang paling tepat bagi kelompok perempuan pelaku usaha yang biasa disebut kelompok produktif dalam meningkatkan usahanya. Koperasi ini mempunyai potensi besar dalam pemberdayaan perempuan, yang kebanyakan adalah pelaku usaha mikro kecil (UMK), yang seperti kita ketahui mempunyai kelemahan dalam mengakses sumber-sumber produktif seperti bahan baku, modal, teknologi, pasar, informasi, terutama kredit perbankan karena terbentur masalah collateral. Dengan berkoperasi atau berkelompok mereka dapat secara bersama-sama mempermudah memperoleh bahan baku, bahan pembantu produksinya dengan harga/biaya lebih murah, serta lebih mudah memperoleh kredit untuk penambahan modal investasi maupun modal kerja.

Berdasarkan data sekunder pendataan Kementerian Koperasi dan UKM (2006), jumlah Koperasi Wanita Kopwan di Indonesia (31 propinsi), pada tahun 2006 sebanyak 1517 unit dengan jumlah anggota 220.740 orang, yang mana jumlah Kopwan tersebut meningkat 105,83% dari tahun 2005 (737unit), yang meningkat 83,33% bila dibanding pada tahun 2002 (402 unit). Kopwan paling banyak terdapat di Jawa Timur (212 unit), diikuti Jawa Barat (195 unit), Jawa Tengah (96 unit), NAD (94 unit), dan paling sedikit di Maluku Utara dan Irian Jaya Barat masing-masing 8 unit. Sesuai kebutuhan beberapa primer Kopwan telah membentuk Puskopwan tingkat propinsi dan telah dibentuk Inkopwan yang berkedudukan di Jakarta.

Meskipun wanita memiliki berbagai kelemahan yang dapat menghambat kinerja usahanya seperti diuraikan pada bab terdahulu namun dalam kenyataannya beberapa koperasi dan UKM yang dikelola wanita menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Beberapa koperasi wanita yang kinerjanya cukup baik dan dapat dikatakan cukup pesat perkembangannya antara lain : 1). Koperasi Setia Bhakti Wanita di Surabaya : dengan kegiatan usaha andalan simpan pinjam, memiliki anggota lebih dari 11.000 orang dengan 377 kelompok, pada akhir 2005 telah memiliki asset sekitar Rp 81, 2 milyar dengan volume usaha mencapai Rp 101 milyar per tahun atau Rp 8,4 milyar per bulan, 2). Kopwan Kartika Candra, 3) Koperasi Dian Wanita, 4). Kop Annisa di NTB, mempunyai anggota lebih dari

5000 orang dengan berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan, 5) Kopwan Permata Kuningan dengan jumlah anggota hampir 4000 orang, dan sebagainya.

Sejalan dengan tujuan pembentukan Kopwan yaitu untuk memenuhi kebutuhan kelompok wanita produktif, pelaku usaha mikro kecil guna memecahkan masalah utama yang sering menghambat perkembangan usahanya yaitu masalah permodalan, maka kegiatan usaha Kopwan yang paling banyak adalah usaha simpan pinjam (56,11%), kemudian serba usaha sekitar 23,11%, kegiatan produksi/kerajinan (1,39 %), usaha konsumsi (0,31%), dan tidak ada data (19,09%). Total modal Kopwan seluruh Indonesia sebesar Rp 831 milyar, terdiri dari modal sendiri sebesar Rp 426 milyar (51,24%) dan modal luar Rp 405 milyar (48,76%). Modal luar berasal dari kredit perbankan, bantuan perkuatan/dana bergulir, seperti program agribisnis, subsidi/PKBS BBM, PUK, Syariah, maupun program P2WUM, LEPMM, P2KER, MAP, P3KUM dan sebagainya. Volume usaha yang dicapai Kopwan seluruh Indonesia sebesar Rp 1.401 trilyun, dengan volume usaha tertinggi dicapai Kopwan Kartika Candra Jawa Timur yaitu Rp 110 milyar. Total Sisa Hasil Usaha yang diperoleh seluruh Kopwan Rp 118 milyar.

Dilihat dari tenaga kerja yang diserap, Kopwan seluruh Indonesia mempunyai tenaga kerja sebanyak 1760 orang yang terdiri dari tenaga kerja wanita sebanyak 1576 orang atau 89,5% dan tenaga pria sebanyak 184 orang atau 10,5 %, disamping itu kebanyakan Kopwan juga memiliki tenaga kerja paroh waktu atau part time yang jumlahnya diperkirakan lebih banyak dari pada tenaga tetap. Sedang dalam hal pengangkatan manajer, Kopwan yang telah memiliki manajer sebanyak 334 unit atau 25,8 %.

Peran Kopwan dalam pemberdayaan perempuan yang paling dominan adalah memberikan kredit modal investasi maupun modal kerja pada anggota pada khususnya yang sebagian besar merupakan anggota kelompok produktif yaitu pelaku UMKM dan masyarakat sekitar pada umumnya yang ingin mengembangkan usahanya atau memulai usaha melalui unit simpan pinjam, yang sebelum berdirinya Kopwan mereka sering terjerat oleh para pelepas uang dengan bunga tinggi. Kopwan yang cukup berhasil dalam usaha simpan pinjamnya antara lain Kopwan Setia Bhakti Wanita, Kartika Candra di Surabaya, Citra Mandiri, Citra Lestari, Annisa di NTB, Kartini di Denpasar, Dian Wanita, K31 di Jakarta, serta Teratai di Makassar. Keberhasilannya Kopwan dalam mengelola kegiatan simpan pinjam karena kebanyakan sudah menerapkan sistem tanggung renteng, yang dipelopori oleh Kopwan Setia Bhakti Wanita. Keberhasilan Kopwan selain karena menerapkan simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng, juga pengurus/ pengelola merupakan wanita yang profesional, ulet, tangguh, penuh strategi, memiliki jiwa wiraswata tinggi sehingga cepat menangkap peluang usaha yang ada seperti usaha pertokoan/swalayan, kebutuhan konsumsi, persewaan, catering, wartel, voucher dan sebagainya.

Peran Kopwan lainnya dalam pemberdayaan perempuan antara lain memberikan pelatihan, konsultasi usaha, peningkatan ketrampilan baik dalam hal teknis usaha seperti organisasi, manajemen, administrasi/akutansi usaha, maupun peningkatan kualitas produk, akses kepada sumber-sumber produktif, informasi

pasar, peluang usaha, juga peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan kesadaran perempuan atas hak-haknya di lingkungan kerja maupun keluarga, social, hokum, maupun politik. Kopwan yang menonjol dan memiliki kompetensi seperti itu adalah Kopwan Annisa di Mataram, yang mana kopwan ini bekerjasama dengan berbagai jaringan, lembaga, baik nasional maupun internasional telah melakukan berbagai program antara lain: - Program Kredit Mikro dari BI (1999), - Program Konsultasi Keuangan Mitra Bank (2004), - Program Peningkatan Pekerja Trampil (P3T) bekerjasama dengan Depnaker (1998),-Program Grameen Bank (2003), -Program Pengadaan Pangan, dengan BRI cabang NTB (1999),- Program Life Skill bekerjasama dengan Dpdiknas dan Dikpora NTB (2002-2003),- Fasilitator Tutor Keaksaraan Fungsional di NTB (2003-2006),- Pendampingan program keaksaraan fungsional se NTB (2004-2005), KUPP (2004) dan PAUD (2005),- Program Magang di NTB (2006), - Program Sistem Vocher (2004 – 2007),-Pendidikan Keluarga berwawasan Gender (2004-2005), Program Pendidikan Penanganan Gizi Buruk di Kecamatan Lingsar (2005-2006),- Program Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Paket B di Kecamatan Lingsar (2005-2006),- Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat bekerjasama dengan PT Aero Wisata (1995),-Proyek Pengembangan Kredit Candak Kulak (P3KCK) dengan Kementerian Koperasi dan UKM (2005),

Adapun berbagai kegiatan/program pemberdayaan perempuan pelaku UMKM bekerja sama dengan jaringan lembaga internasional seperti: 1). New Zealand Embassy: program pemberdayaan perempuan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan kelompok (1998-1999 dan 1999-2001). Selain itu juga melaksanakan berbagai program pemberdayaan perempuan baik dari aspek kesehatan, pendidikan, penyadaran akan hak-hak mereka dalam bidang ekonomi, sosial, politik, maupun budaya, 2). UNICEP : khususnya dalam program Development Local Material for Non Formal Education (1997), pemberdayaan ekonomi wanita, 3). Plan International, dalam program pemberdayaan sosial ekonomi kelompok dampingan Plan International Lombok Timur (199-2000), - aktualisasi warga belajar pendidikan fungsional (1999),- Need Assesment Plan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi masyarakat melalui pembentukan Koperasi Desa Ketangga Lombok Timur (tahun 2000 dan 2000-2001), - Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi masyarakat melalui pengembangan dan pendidikan fungsional bagi perempuan Desa Ketangga Lombok Timur (2000-2001), - Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi masyarakat melalui pengembangan dan pendidikan fungsional bagi perempuan di 4 desa binaan International PU Ketangga Lombok Timur (2000-2001), 4). Plan Indonesia-SIKKA NTT: program TOT fasilitator keaksaraan Fungsional (2004-2006) dan evaluasi program (2005-2006), 5). Plan Indonesia-Bima NTB dalam Need Assesment Kelompok Usaha Bersama (KUB) di 5 desa binaan Plan Indonesia-Bima (2004), 6). World Food Program di bidang Food Security Project di NTB (1998), 7). Canadian Cooperative Association (CCA), program difokuskan pada : Institutional Strenthening of Womens Small Vendor Cooperation in NTB via Capital Mobilization (1991-1992)dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Annisa (1992 -1999), 8). CANADA FUND dalam program pemberdayaan sosial ekonomi perempuan melalui peningkatan pendapatan, pendidikan dan latihan serta

pendampingan kelompok, 9). FES/WSO program yang dilakukan adalah pendampingan dan bimbingan usaha dan on the job training (1997), Intalate on Internet Facilitator (1998), pelatihan dan bimbingan usaha perempuan usaha kecil (1999 – 2000) dan lokakarya dan pembentukan jaringan PUK di NTB (1999), 10). CUSO: kerjasama dengan lembaga ini di bidang identifikasi masalah gender di Lombok (1999) dan workshop hasil identifikasi masalah gender (1999), dan annual meeting gender working group (1999), 11). UNISCO dalam program pemberdayaan perempuan petani di Lombok (1999), pemberdayaan kelompok PUK di NTB (2000), program pengembangan perempuan petani berperspektif gender (2000 – 2003), dan program STEVE for Girls (2003 – 2005), 12). LAND O'LAKES dalam pemantauan susu sekolah / UKS bagi siswa SD/MI di Lombok NTB (2002 – 2004), 13). USAID dalam program Civil Education Symposium (1999) dan program PBHF (1993 – 1995), 14). UNDP dalam program pemantauan kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Lingsar (2005 – 2006), 15). ACCESS Australia dalam program Need Assesment di 11 LKM binaan Mitra Access di NTB (2005 – 2006)

Berangkat dari keberhasilan koperasi wanita dalam mengelola usaha simpan pinjam, serta peran strategis koperasi dalam pemberdayaan perempuan pelaku UMKM, maka sejak tahun 2006 Kementerian Koperasi dan UKM mencanangkan program PERKASSA (Program Perempuan Keluarga Sehat Sejahtera), Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pelaku usaha mikro kecil dan menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru, dengan memberikan perkuatan modal bergulir kepada kelompok-kelompok kegiatan produktif, yang kebanyakan adalah perempuan. Pada tahun 2006 dana yang telah dikucurkan melalui program ini sebesar Rp 200 miliar, dan pada tahun 2007 akan ditingkatkan menjadi Rp 250 miliar, yang akan menjangkau 250 koperasi wanita.

V. PENUTUP

Persoalan perempuan tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor ideologi, struktural dan kultural, ketiganya saling terkait menguatkan suatu situasi yang sangat tidak menguntungkan perempuan. Ideologi patriaki yang bergandengan dengan ideologi *gender* telah merasuki struktur dan sistem sosio kultural masyarakat yang menempatkan perempuan di posisi pinggiran, peran dan status perempuan yang bersifat sekunder.

Tiga program utama program pembangunan untuk perempuan, pada prinsipnya berpandangan bahwa masalah keterbelakangan perempuan karena perempuan itu sendiri, sehingga program yang digulirkan difokuskan pada memenuhi kebutuhan praktis yaitu perempuan hanya sebagai pemanfaat. Sedang kebutuhan strategis berkaitan dengan peranan, dan kedudukan dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti ekonomi, sistim politik, perundang-undangan, norma sosial budaya dan lain-lain belum tersentuh.

Usaha mikro kecil merupakan kegiatan ekonomi yang menjadi pilihan kebanyakan anggota masyarakat, terutama kelompok perempuan, yang banyak berkecimpung dalam kegiatan industri kerajinan dan industri rumah tangga, baik

perempuan tersebut “bekerja sendiri” atau sebagai “pekerja keluarga yang tidak dibayar”. Dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan perempuan pemerintah telah mengeluarkan berbagai program, seperti kredit program, kredit untuk usaha kecil yang dikenal dengan KIK dan KMKP. Namun kebijakan tersebut bersifat umum tidak membedakan laki-laki atau perempuan, keduanya memiliki peluang yang sama untuk mendapat kredit, dengan demikian kebijakan tersebut dapat dikatakan bersifat *gender blind*. Karena dalam akses terhadap sumber perkreditan, yang mensyaratkan collateral/agunan, perempuan akan mengalami hambatan, sebab status kepemilikan barang berharga atau harta yang dapat diajukan sebagai jaminan kebanyakan atas nama suami sebagai kepala rumah tangga.

Dengan berkiprah di koperasi perempuan tidak banyak terhambat oleh ideologi patriaki yang mengunggulkan pria dari pada perempuan, karena dalam koperasi pria dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban sama, dalam koperasi tidak ada deskriminasi sosial, politik, ekonomi, adat, budaya, hukum dan agama. Dalam koperasi perempuan disamping dapat memperjuangkan kepentingan ekonominya, juga dapat mengaktualisasikan jati dirinya, bebas menyampaikan aspirasi dan pendapatnya,

Dengan kata lain koperasi dapat berperan strategis memberdayakan perempuan, dan sebaliknya dengan koperasi perempuan dapat membuktikan kompetensi dan kelebihannya, sebagaimana ditunjukkan oleh keberhasilan beberapa koperasi dan UMKM yang dikelola perempuan tanpa harus mengorbankan perannya sebagai ibu rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anniswati M. Kamaluddin, (2000). *Pikiran, Kiprah dan Perjuangannya Mengangkat Martabat Perempuan*, Intrans Jakarta, cetakan pertama.
- Anonim, (2001). *Studi Peran Wanita Dalam Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah*, Badan Pengembangan Sumberdaya KPKM.
- Anonim, (2000). *Wanita dan Pria Di Indonesia 2000*, Biro Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS, Jakarta.
- Anonim, (2006). *Laporan Akhir Pendataan Koperasi Yang Responsif Gender*, Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil menengah dengan PT Solusi Dinamika Manajemen
- Anonim, (1994). *Usaha Bersaing Untuk Wanita dan Pemuda*, Ide Usaha Kecil dan Madya, Cakrawala Cinta, Jakarta.
- Fakih M, (1996). *Gender sebagai Alat Analisis Sosial*, Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan, Jurnal Analisis Perempuan, Yayasan AKATIGA, Pusat Analisis Sosial, Bandung.
- Hetifah S. (1995), *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, Seri Penelitian Akatiga, Yayasan Akatiga, Bandung.
- Wijaya S A, (2007). *Menjadikan Wanita Lebih Perkasa*, PIP, Jakarta.

Sumampouw S. A. dkk, (2000). *Menegakkan Tradisi*, Seri Usaha Mikro Kecil, Swisscontact & Limpad, Jakarta.

Sumampouw S. A. dkk, (2000). *Ada Bersama Tradisi Tradisi*, Seri Usaha Mikro Kecil, Swisscontact & Limpad, Jakarta.